

Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Beuki Kabupaten Situbondo)

Nuzul Wahyuni*, Ibna Kamilia Fiel Afroh

Akuntansi/Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

*email: nuzulwahyuni68@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:
Dana Desa,
Kompetensi,
Sistem
Pengendalian
Internal,
Akuntabilitas

Good government is one of the demand of society that must be met. The existence of this demand is the result of Law Number 6 of 2004 concerning villages. The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the influence of competence and internal control systems on the accountability of village fund management. The accountability of village fund management is the responsibility of the village government to the village community regarding the management of village funds. This research was conducted in Besuki Subdistrict, Situbondo District, totaling 10 villages. This research data collection technique using a questionnaire with the number of respondents as many as 30 respondents who were determined using a non-probability sampling method, namely purposive sampling. The data analysis technique used multiple linear regression test. The results of this study indicate that competency and internal control systems have a positive effect on the accountability of village officials in managing village funds.

ABSTRAK

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Adanya tuntutan ini hasil dari Undang-Undang No.6 Tahun 2004 tentang desa. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, yang berjumlah 10 desa. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 30 responden yang ditentukan menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang pesat dibuktikan dengan adanya era reformasi maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan tentang kewenangan daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu agenda utama dalam pembangunan nasional dengan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia menjadi negara maju, mandiri, dan demokratis salah satunya dengan cara meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa inilah yang menjadi langkah awal Desa untuk menunjukkan kemandiriannya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan jumlah dana desa yang diterima selalu meningkat setiap tahun, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan Perangkat Desa yang berkompeten dan Sistem Pengendalian Internal yang baik serta sarana dan prasarana lain yang mendukung dan memadai agar pengelolaan Dana Desa menjadi akuntabel dan optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjelaskan tentang proses pengelolaan dana desa yang dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan, serta pertanggungjawaban. Selain itu dijelaskan juga bahwa semua proses pengelolaan dana desa harus didasari oleh tiga asas yaitu asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif. Dalam pengelolaan Dana Desa ada sebuah tuntutan yang harus dicapai dan dimiliki oleh suatu aspek tata pemerintahan dimana salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas. Untuk mengetahui berhasil tidaknya akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan ada banyak faktor yang dapat memengaruhi aspek tersebut (Cheng, R. H, 2002).

Salah satu faktor paling penting dalam sebuah organisasi pemerintahan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebab dari kinerja merekalah dapat dinilai berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, akan menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Kompetensi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan sebagai kemampuan kerja pada

setiap individu yang memncakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Agar tercapai akuntabilitas yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan serta pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Oleh karena itu, selain kompetensi yang baik juga dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatann pemerintah dapat berjalan dengan baik dibuktikan dengan melaporkan laporan keuangan secara andal, mengamankan aset serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang ditetapkan agar tujuan tercapai. Sistem ini biasa disebut dengan Sistem pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah prose yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal yang dikelola dan dijalankan dengan baik akan dapat memengaruhi system pengambilan keputusan Pemerintah Desa sehingga berimplikasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjelaskan masalah utama dalam pengelolaan dana desa terjadi karena rendahnya pengetahuanPerangkat desa ketika mengelola dan membuat laporan keuangan sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi (Abidin, 2015). Bambang Priyanto selaku Kepala Insektorat mengatakan pengelolaan dana desa di Situbondo masih lemah, karena para Kepala Desa diSitubondo diketahui masih banyak melakukan kesalahan akibat dari ketidakpahaman. Sedikitnya ada 9 Kepala Desa se-Situbondo yang menjalani pemeriksaan terkait penggunaan dana desa yang bermasalah terkait penyelesaian SPJ penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 (BPK Jatim, 2019). Hal tersebut terjadi lantaran lemahnya pemahaman para kepala desa dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemkab Situbondo. Oleh karena itu, para kepala desa di Kabupaten Situbondo masih butuh pembinaan untuk mengeola anggaran Dana Desa dan Dana Desa secara baik dan benar (Bari, 2018, Desember 6).

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dipilih menjadi objek penelitian ini dikarenakan Kecamatan Besuki merupakan salah satu unsur PelaksanaPemerintah Kabupaten Situbondo, selain itu juga sebagai Kecamatan penerima Dana Desa terbesar di Kabupaten Situbondo yang mengemban tugas dan tanggung jawab yangbesar baik dalam Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil audit Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) Kabupaten Situbondo, Permasalahan yang pernah terjadi di Kecamatan Besuki adalah kesalahan administrasi dalam mengelola tanah kas Desa yang disewakan tanpa melalui proseduryang benar yang pernah terjadi di

Desa Langkap dan Desa Demung Kecamatan Besuki, walaupun telah diselesaikan dengan pengembalian. Kedua Kepala Desa yang mengembalikan uang hasil tindak korupsi tanah kas desa yakni, Kepala Desa Demung, Yudi Suryantomengembalikan uang sebesar Rp 680.302.187, sedangkan Kepala Desa Langkap, Agus Suhartono mengembalikan uang sebesar Rp 127.500.000 (Bari, 2018, Desember 6).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian agar mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”.

Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kausakalias. Menurut Sugiyono (2018) Penelitian Kausakalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Participant Observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, artinya peneliti secara langsung ikut serta dalam kegiatan suatu objek penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan Skor *Skala Likert 1-5*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berada di setiap desa di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang berjumlah 116 orang yang tersebar di 10 Desa yaitu : Desa Widoropayung, Desa Langkap, Desa Blimbing, Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Pesisir, Desa Demung, Desa Besuki, Desa Bloro dan Desa Kalimas. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Penentuan responden dengan jumlah Desa sebanyak 10 Desa ialah ditentukan masing-masing Desa terdapat 3 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukanyaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 Orang Bendahara Desa, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.

Hipotesis Penelitian

H1 : Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

H2 : Kompetensi Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Besuki adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Memiliki letak wilayah yang sangat strategis dengan letak astronomis 7⁰ 43’ Lintang Selatan 113⁰ 41’ Bujur Timur menjadikan Kecamatan ini memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kota penting di Nusantara dibuktikan dengan banyaknya tempat peninggalan bersejarah. Terbagi dalam 10 Desa yaitu Desa Widoropayung, Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Blimbing, Desa Langkap, Desa Bloro, Desa Pesisir, Desa Kalimas, Desa Besuki, dan Desa Demung. Jumlah penduduk Kecamatan Besuki adalah 65.635 Jiwa dengan rincian 32.025 jiwa laki-laki dan 33.610 jiwa perempuan. Luas Kecamatan Besuki adalah 26,08 Km² dengan batas administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara : Selat Madura, Sebelah Selatan : Kec. Jatibanteng dan Kec. Sumbermalang, Sebelah Barat : Kec. Banyuglugur, Sebelaha Timur : Kec. Suboh.

Berdasarkan estimasi regresi linier berganda dengan program IBM SPSS diperoleh hasil seperti dibawah ini :

Tabel 1. Hasil analisis regresi linier berganda

| No | Variabel | Koefisien Regresi | Standart Error |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Konstanta | 3,249 | 2,740 |
| 2. | X1 (Kompetensi) | 0,261 | 0,123 |
| 3. | X2 (Sistem Pengendalian Internal) | 0,397 | 0,225 |

Berdasarkan tabel 1. diatas maka persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + e$$

$$Y = 3,249 + 0,261 X1 + 0,397 X2 + e$$

Hasil uji dan analisis statistik penelitian ini berdasarkakn analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internnal sehingga diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi (X1) berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Besuki Kabupaten

Situbondo ditunjukkan dengan hasil nilai $t_{hitung} (2,127) > t_{tabel} (1,703)$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian Kompetensi para Pengelola Dana Desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo saat mengelola Dana Desa yang jumlahnya terbesar jika dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Situbondo tergolong baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden mayoritas menjawab setuju mengenai kompetensi mencakup pengetahuan, kemampuan dan sikap. Kompetensi pengetahuan yang dimiliki pengelola Dana Desa Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo diantaranya dibuktikan dengan kemampuan dalam memahami tentang tugas dan fungsi serta batasan dalam mengelola Dana Desa, ikut serta dalam berbagai macam pelatihan yang biasanya diadakan oleh pemerintah, serta mampu memahami teknologi informasi agar dapat menunjang pekerjaannya terutama untuk meningkatkan kompetensi kemampuan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Selain itu, Kompetensi sikap dalam bekerja juga diterapkan dalam mengelola Dana Desa demi menghasilkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik pula.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ditunjukkan dengan hasil nilai $t_{hitung} (1,768) > t_{tabel} (1,703)$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan penelitian Sistem Pengendalian Internal pada setiap Desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang berjumlah 10 Desa telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden mayoritas menjawab setuju mengenai lingkungan pengendalian dengan mempunyai struktur organisasi yang jelas dan selalu berkomitmen terhadap kompetensi baik dari segi pengetahuan, kemampuan serta sikap yang baik, dilakukannya penilaian risiko sebelum menjalankan kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan kegiatan pengendalian untuk mengurangi risiko pelanggaran saat mengelola Dana Desa, informasi dan komunikasi telah dijalankan secara terbuka diantara pengelola kegiatan, pemerintah dan masyarakat luas, serta adanya tindak lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh inspektorat. Lima hal kegiatan pengendalian internal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada 10 Desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah dilaksanakan dengan baik agar menghasilkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik pula.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan dari hasil analisis data kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X1 (Kompetensi) berpengaruh terhadap variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ditunjukkan dengan hasil nilai $t_{hitung} (2,127) > t_{tabel} (1,703)$ serta signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X2 (Sistem Pengendalian Internal) berpengaruh terhadap variabel Y (Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa) di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ditunjukkan dengan hasil nilai $t_{hitung} (1,768) > t_{tabel} (1,703)$ serta signifikansi $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Bari, F. (2018, Desember 6). Dua Kades di Situbondo Kembalikan Uang Hasil Korupsi TKD ke Kejari. diakses dari <https://faktualnews.co/2018/12/06/dua-kades-situbondo-kembalikan-uang-hasil-korupsi-tkd-kejari/111741/>
- Cheng, R. H., Engstrom, J. H., & Kattelus, S. C. (2002). Educating Government Financial Managers: University Collaboration Between Business and Public Administration. *The journal of Government Financial Management*.
- Ghozali, Imam . (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponego.
- Maria Eni Surasih. (2002). Pemerintah Desa dan implementasinya, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pasa Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga *Journal of*

- Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1, Oktober 2019.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.07/2015. (2015). *PMK_93-PMK.07-2015* Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Pemerintah Kabupaten Situbondo. (2018). Peraturan Bupati situbondo No. 71 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019. 1965, 1–22.
- Pratiwi, S. A. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Mengelola Dana Desa (DD) (Studi Empiris Di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso) (p.(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah J).
- Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(3), 560–568.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 49(95), 980. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003. tentang Ketenagakerjaan. 1, 1–34. Jakarta.
- Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 2018.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tjutju, Y. (2008). Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia.